

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Attamini, A Hamid S. 1990. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV*, Disertasi Fakultas PPS, Univ. Indonesia, 1990, Jakarta
- Budiarto. Ali. 2001. *Hukum Putusan Mahkamah Agung Tentang Hukum Kepailitan* IKAHI, Jakarta
- Eliyana. 2001. *Proses/Cara Mengajukan dan Penyelesaian Rencana Perdamaian pada Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran*, Dalam Rudhy A. Lontoh, dkk, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung
- Fuady, Munir. 1999. *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bhakti, Bandung
- _____ 1999. *Hukum Pailit*. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Harahap, M. Yahya. 1989. *Ruang Lngkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Gramedia, Jakarta
- _____ 1997. *Hukum Acara Perdata Peradilan Indonesia*. Zakir, Medan
- _____ 1995. *Arbitrase*, Pustaka Kartini,, Jakarta
- Ihsan, Muhammad. 2005. *Tinjauan Yuridis Terhadap Pembayaran Hutang Dalam Keadaan Pailit (Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif)*, skripsi, Twinning Program UMM, 2005
- Jono. 2008. *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Kelsen, Hans. 1995. *Teori-Teori Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Empirik-Deskriptif*, Alih Bahasa Soemardi, Rimdi Press, Jakarta
- Mertokusumo, Sudikno. 2001. *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta
- Mahkamah Agung RI. 2003. *Insevice Training Beberapa Materi Kepailitan pada pelatihan Pusdiklat Mahkamah Agung RI*, MARI, Jakarta
- Priyatna, Abdulrasjid. 2001. *Comercial Arbitration*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Depkeh dan HAM RI bekerjasama dengan Pusdiklat MA RI dan Panitia Pengarah Pengadilan Niaga, Jakarta

- Panggabean, HP. 2001. *Upaya perdamaian menurut Pasal 130 HIR*. Yogyakarta
- Sukarmin. 2005. *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Kerugian Konsumen Yang Disebabkan oleh Perjanjian Baku (Standar Contract) dalam Transaksi Elektronik*, Disertasi PPS Unpad, Bandung
- Soebekti, R. 1988. *Aneka Perjanjian*, Internusa, Bandung
- _____ dan R. Tjitrosudibyo. 1999. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. 1995. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Alumni, Bandung
- Suryana, Daniel. 2007. *Hukum Kepailitan*, Pustaka Sutra, Bandung
- Sastrawidjaja, Man S. 2006. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2002. *Hukum Kepailitan*, Grafiti, Jakarta
- _____ 2002. *Hukum Kepailitan : Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta
- Sungkono, Bambang. 2001. *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sinaga, Syamsudin M. 2012. *Hukum Kepailitan Indonesia*, Tata Nusa, Jakarta
- Tumbuan, Fred BG. 2001. *Ciri-ciri Utama Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dimaksud Dalam Undang-Undang Tentang Kepailitan*, Dalam Rudhy A. Lontoh, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung
- Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Waluyo, Bernadette, 1999. *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Mandar Maju, Bandung
- Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja. 2004. *Kepailitan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta

B. Jurnal, Makalah, Artikel.

HP. Panggabean. *Hukum Bisnis*, Volume 22 No. 4 tahun 2003

Malau, Erwin Mangatas. *Rancangan Perubahan Undang-Undang Kepailitan dan Perspektif Hukum Niaga*, Jakarta : Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 17, 2002

Panggabean, HP. *Penerapan Asas-Asas Pengadilan Dalam Kasus Kepailitan*, Jakarta : Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 7, 1999

C. Perundang-undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945

_____ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

_____ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

_____ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

